

KORELASI E-GOVERNMENT DAN KORUPSI DI ASIA: HASIL REGRESI DATA PANEL DENGAN E-VIEWS 3.1.

Chandra Emirullah

*Pemerintahan (Kerajaan), Undang-undang, Kerajaan, dan Kajian Internasional
(COLGIS), Universiti Utara Malaysia (UUM)
emirullah@uum.edu.my*

Abstrak

Walaupun pemerintah telah melakukan meningkatkan upaya pemberantasan korupsi beberapa tahun terakhir ini, namun tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi. Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya telah mengambil langkah baru yaitu e-government untuk mengurangi korupsi, namun belum ada bukti empiris yang meyakinkan tentang keberhasilannya. Studi ini melihat bagaimana dampak e-government terhadap korupsi di sejumlah negara Asia dengan menggunakan pendekatan panel data. Didapatkan e-government berdampak positif, demikian juga dengan peningkatan pendapatan, penegakan hukum dan pengendalian inflasi.

Kata kunci: e-government, e-budgeting, e-procurement, korupsi, panel data

PENDAHULUAN

Masalah korupsi merupakan masalah yang sangat besar di Indonesia dan juga di dunia pada umumnya, terutama dikalangan negara-negara berkembang. Penyakit korupsi di Indonesia sudah mewabah kemana mana terutama di sektor pemerintah baik pusat maupun di daerah. Walaupun sudah cukup banyak langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memberantas korupsi namun tetap saja kasus korupsi bermunculan hampir setiap hari seperti yang kita baca atau dengar di media masa.

Banyak pelaku korupsi mulai dari pejabat tinggi seperti menteri, gubernur/wakil gubernur Bank Indonesia, gubernur propinsi, bupati sampai pegawai biasa dan juga pengusaha telah dibawa ke pengadilan dan mendapat hukuman yang cukup berat. Namun tetap saja para pelaku

korupsi tidak merasa takut dan tetap melakukannya tiap kali ada peluang untuk memperkaya diri. Kasus besar terakhir yang sangat merisaukan adalah yang menyangkut ketua Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya merupakan benteng terakhir dari pada penegakan hukum di negara ini.

Salah satu sebab mengapa banyak terjadinya kebocoran dalam anggaran pemerintah baik di tingkat pusat (APBN) maupun di daerah (APBD) adalah lemahnya sistim pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasannya. Masih banyak celah-celah yang dapat digunakan untuk memanipulasi dana yang tersedia dalam anggaran belanja dan juga dalam pengumpulan hasil pajak guna membiayai pengeluaran pemerintah tersebut. Karena itu tanpa pembenahan yang serius terhadap sistim pengelolaan keuangan pemerintah, sukar diharapkan

tingkat korupsi akan dapat diturunkan secara berarti.

Terpilihnya Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama (masing-masing lebih dikenal dengan Jokowi dan Ahok) sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 membawa angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi bukan saja di Jakarta tetapi juga di daerah-daerah. Kedua tokoh ini menunjukkan komitmen yang tinggi guna menekan korupsi di kalangan pemerintah daerah DKI dan telah mengambil langkah-langkah inisiatif baru guna mengurangi kebocoran dalam APBD.

Salah satu langkah tersebut adalah dengan menerapkan *e-government* termasuk didalamnya *e-budgeting* dan *e-procurement*, guna meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan/atau jasa. Dengan dilaksanakannya *e-budgeting* pelaksanaan dan pengawasan anggaran dalam program-program Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dapat dilakukan secara lebih cermat dan cepat. Perubahan dalam anggaran, program maupun kegiatan SKPD tidak dapat dilakukan begitu saja dalam dokumen anggaran tanpa melalui prosedur yang berlaku dan mendapatkan izin dari yang berwenang. Dengan penerapan *e-budgeting* ini diharapkan anggaran siluman yang muncul kerana adanya kerja sama antara pihak eksekutif dan legislatif maupun pembengkakan anggaran (*mark-up*) dapat ditekan seminimal mungkin.

Begitu juga dalam pengadaan barang dan jasa baik untuk kegiatan proyek pembangunan maupun rutin, penerapan *e-procurement* diharapkan dapat menghasilkan harga tender yang paling wajar sesuai dengan spesifikasi barang yang ditentukan. Dengan sistem ini kesempatan untuk bertemu muka antara pihak pejabat pemda sebagai

pemilik proyek dengan rekanan yang mengikuti tender jauh berkurang. Dengan demikian kebocoran akibat adanya kongkalikong dalam tender yang selama ini sering berlaku dapat dikurangi secara signifikan.

Walaupun banyak anggapan bahwa penggunaan sistem *e-government* yang meliputi sistem *e-budgeting* dan *e-procurement* dapat mengurangi korupsi, belum banyak kajian empiris yang dilakukan guna melihat efektifitas daripada sistem yang inovatif ini. Kajian kajian yang telah dilakukan pada umumnya menggabungkan negara-negara maju dengan berkembang dan hasilnya belum menunjukkan kesimpulan yang meyakinkan.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari pada makalah ini adalah untuk mengkaji seberapa jauh dampak penerapan *e-government* dalam mengurangi praktek korupsi secara umum disejumlah negara khususnya di Asia dan faktor-faktor apa yang dapat menunjang keberhasilannya. Negara negara di Asia lebih mempunyai karakteristik yang sama dengan Indonesia dibanding wilayah-wilayah lainnya didunia. Studi ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka pelaksanaan *e-government* di Indonesia sehingga membawa hasil yang memuaskan.

Sejumlah kajian telah dilakukan oleh para peneliti mengenai dampak *e-government* terhadap korupsi yang pada umumnya menyatakan adanya efek yang positif, walaupun ada juga yang tidak menemukan hubungan yang signifikan.

UNDP (2006), dalam penyelidikannya dengan menggunakan pendekatan statistik mendapatkan bahwa untuk negara-negara berkembang, penggunaan *e-government* telah dapat menurunkan tingkat korupsi secara berarti. Namun untuk negara-negara

maju yang tergabung dalam OECD, tidak diketemukan tanda-tanda yang nyata akan adanya penurunan korupsi.

Andersen (2009), dengan menggunakan panel data dari 149 negara bukan- OECD untuk periode 1996-2006 dan indikator “*control of corruption*” sebagai variabel terikat mendapatkan bahwa penerapan *e-government* sangat berguna dalam menurunkan korupsi.

Garcia-Murillo dan Ortega (2010), menggunakan model Klitgaard dimana variabel variabel yang digunakan antara lain adalah *portal-portal Web* pemerintah, besarnya kekuasaan dan diskresi pejabat pemerintah serta akuntabilitas birokrasi. Berdasarkan metode data panel enam tahun (2002-2005 dan 2008) untuk 187 negara, didapatkan penerapan *e-government* secara umumnya berhasil menurunkan korupsi dikalangan negara-negara tersebut. Namun model *fixed-effects* mereka, yang mengontrol pengaruh khusus masing-masing negara, tidak menunjukkan adanya efek yang cukup berarti.

Suatu kajian dilakukan oleh sekelompok peneliti dari Universitas Harvard, Michigan dan MIT pada tahun 2013 atas 20,000 dan 14,000 kontrak pemerintah India dan Indonesia untuk program pembangunan jalan raya. Didapati penggunaan *e-procurement* tidak membawa penurunan harga kontrak secara signifikan di kedua negara karena masih ada celah dalam penentuan spesifikasi barang walaupun ada peningkatan dari segi mutu pekerjaan (Holman, 2014).

Grönlund (2011) mengemukakan bahwa walaupun banyak hasil penelitian menunjukkan korelasi positif antara *e-government* dan pemberantasan korupsi, tetapi belum dapat diyakini kesahihannya karena indeks dan variabel yang digunakan berasal dari begitu banyak pilihan yang dapat digunakan.

Untuk itu Grönlund membandingkan ketangguhan dari pada berbagai indeks yang digunakan dalam banyak penelitian mengenai efek *e-government* terhadap korupsi seperti yang diciptakan oleh PBB (EGDI), Universitas Brown dan Waseda, serta majalah the Economist sebagai indikator variabel terikat dan *corruption control index* (CCI), *corruption perception index* (CPI) sebagai variabel bebas.

Penggunaan berbagai indeks *e-government* yang berbeda didapati menghasilkan jurang perbedaan koefisien korelasi yang lebar mulai dari 0.49 (kurang signifikan) sampai 0.95 (sangat signifikan). Kesimpulannya para peneliti hendaklah menggunakan indeks atau variabel yang benar-benar mencerminkan kenyataan atau fakta bukan hanya persepsi, misalnya hanya berdasarkan popularitas dari suatu laman web, tanpa melihat efektifitasnya.

Dari tinjauan singkat atas literatur yang ada tersebut, dapat disimpulkan walaupun sebagian besar kajian menyatakan penggunaan *e-government* dapat membantu mengurangi korupsi, namun masih belum konklusif sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut dalam rangka mencapai kesimpulan yang lebih pasti.

METODE PENELITIAN

Kajian ini akan melihat pengaruh *e-government* atas korupsi untuk 17 negara di Asia khususnya di Asia Timur, Tenggara, dan Selatan, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, China, Korea Selatan, Mongolia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan Maldives. Metode yang digunakan adalah data panel untuk periode 2009-2012.

Data yang digunakan sebagai variabel terikat adalah tingkat

pelaksanaan *e-government* berasal dari survei PBB yang dilakukan setiap dua tahun sekali (The UN- E-Government Development Data Base). Walaupun data *e-government* (EGV) dari PBB tersedia sampai dengan tahun 2014, namun data untuk variable lainnya yaitu *GNI percapita*, INF (inflasi), ROL (*rule of law*), dan COC (*perception of control of corruption*) yang dikeluarkan Bank Dunia (World Development Indicator dan World Governance Indicator) hanya

tersedia sampai tahun 2012. Berhubung dengan adanya perbedaan tersedianya data tersebut, maka untuk variable EGV digunakan data tahun 2005, 2008, 2010 dan 2012 sedangkan variable–variabel lainnya menggunakan data tahun 2009 sampai dengan 2012, dengan asumsi adanya jarak waktu (*lag*) bagi dampak *e-government* terhadap korupsi.

Berikut adalah model yang digunakan untuk mengestimasi koefisien persamaan regresi data panel:

$$COC_{it} = a_i + b_1 EGV_{it} + b_2 GNI_{it} + b_3 INF_{it} + b_4 ROL_{it} + E_{it}$$

Dalam hal ini: COC, yaitu persepsi tentang tingkat korupsi sebagai variable terikat.

EGV, yaitu tingkat pelaksanaan *e-government* sebagai variabel bebas yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini.

GNI, INF, dan ROL, masing-masing adalah tingkat pendapatan perkapita, inflasi dan penegakan hukum sebagai variabel control.

E adalah faktor pengganggu

a adalah angka konstan untuk masing-masing negara, I dan t penunjuk negara dan tahun.

Sebagai hipotesis diperkirakan EGV, GNI, dan ROL berdampak positif dalam penurunan korupsi sedangkan INF mempunyai efek yang negatif.

Dengan mengasumsikan karakteristik-karakteristik spesifik masing-masing negara sampel berpengaruh terhadap variable-variabel bebas yang digunakan dan juga karena data panel yang seimbang (Asteriou and Hall, 2007) maka metode yang digunakan adalah *fixed effects*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil estimasi regresi yang didapatkan melalui *e-views 3.1*.

Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat bahwasemua koefisien dari variabel bebas mempunyai tanda yang diharapkan walaupun tidak ada yang signifikan karena angka *probability* yang diatas 0.05 (5%).

Dengan angka koefisien EGV yang positif, berarti peningkatan *e-government* dapat menyumbang terhadap penurunan korupsi. Begitu juga dengan koefisien variabel GNI dan ROL yang berarti adanya kenaikan pendapatan perkapita dan meningkatnya penegakan hukum akan berdampak positif terhadap pengurangan korupsi. Sedangkan untuk INF, tanda koefisien yang negatif menunjukkan penurunan inflasi akan berpengaruh dalam menurunkan korupsi. Kesemua hasil ini sesuai dengan apa yang diperkirakan seperti dinyatakan hipotesis diatas, dan konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya.

Tiadaanya angka koefisien variable bebas yang signifikan secara statistik kemungkinan disebabkan penggunaan data yang terbatas. Oleh karena itu penelitian yang menggunakan data dalam jumlah yang lebih besar, baik menyangkut negara maupuntahun serta variabel yang lebih sesuai diperkirakan akan membawa hasil yang lebih

memuaskan dan mengurangi efek multikolineariti.

Tabel 1. Hasil Regresi Panel Data

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Probability
GNI	0.000320	0.131434	0.002436	0.9981
INF	-0.030609	0.509914	-0.060028	0.9524
ROL	9.19E-05	0.188095	0.000489	0.9996
EGV	1.14E-05	0.104582	0.000109	0.9999

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil regresi panel data diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-government* dapat membantu dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun upaya ini juga perlu diiringi dengan peningkatan pendapatan masyarakat pada umumnya serta para penyelenggara pemerintahan pada khususnya baik di kalangan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Selain itu pengelolaan keuangan negara seperti yang direpresentasikan disini dengan pengendalian inflasi perlu dilakukan dengan baik karena berpengaruh atas daya beli ril masyarakat termasuk pegawai negeri dan pelaku usaha yang berhubungan dengan pemerintah.

Dilain pihak, penegakan hukum yang konsisten, tegas dan tanpa pandang bulu perlu dilaksanakan karena dapat mempunyai efek jera kepada pihak-pihak yang berniat atau punya kesempatan melakukan korupsi. Hal ini perlu mendapat perhatian bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang akan dipimpin oleh bapak Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur yang baru. Demikian juga dengan bapak Joko Widodo yang akan dilantik sebagai presiden RI yang baru minggu depan yang berniat menerapkan *e-government* secara nasional. Kepemimpinan, keteladanan dan komitmen mereka yang tinggi diharapkan dapat mengurangi korupsi secara berarti guna menjaga keberlangsungan pembangunan dan ketahanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersen, T.B. (2009), E-Government as an anti-corruption strategy *Information Economics and Policy*. Volume 21 Issue no.3, August 2009, hal. 201-210. <http://www.sciencedirect.com/science/journal/01676245/21/3>
- Asteriou, D and Hall, S.G. (2007). *Applied Econometrics: A Modern Approach*. Palgrave Macmillan. New York.
- García-Murillo, M. and Ortega.R. (2010). R. Do e-government initiatives reduce corruption? Available at SSRN <http://ssrn.com/abstract=2012470>
- Grönlund, Å., Flygare, A-M. (2011) The Effect of eGovernment on Corruption: Measuring Robustness of Indexes . *Electronic Government and the Information Systems Perspective . Lecture Notes in Computer Science* , 2011, Volume 6866/2011, 235-248, DOI: 10.1007/978-3-642-22961-9_19. Available at: <http://www.springerlink.com/content/f645xk150k715725/>
- Holman, D (2014). E-Government and Corruption: Evidence from India. *The Global Anticorruption Blog*. Available at <http://globalanticorruptionblog.com/2014/08/11/>
- United Nations Development Programme (2006). *Fighting Corruption with e-Government*

Applications – APDIP e-NOTE 8,
2006. Available at

<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/document/undpadm>